



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Bab ini akan membahas mengenai tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang menjadi landasan dalam penelitian. Dalam tinjauan pustaka akan dijabarkan beberapa teori yang relevan dan mendasari topik penelitian. Selanjutnya beberapa hasil penelitian terdahulu yang diperoleh dari jurnal, skripsi, thesis, dan disertasi yang dibuat oleh peneliti lain akan dilampirkan untuk menjadi bahan referensi serta pertimbangan dalam melakukan penelitian.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan beberapa penelitian terdahulu yang diperoleh akan dibangun kerangka pemikiran yang memperlihatkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Kemudian pada bagian akhir akan dibentuk hipotesis penelitian, yaitu dugaan sementara yang masih harus dibuktikan dalam penelitian dan mengacu pada kerangka pemikiran yang telah dibuat sebelumnya.

A. Landasan Teoritis

1. *Grand Theory*

a. Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan merupakan teori yang melandasi hubungan antara manajemen sebagai agen dan pemilik perusahaan sebagai prinsipal. Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan hubungan agensi sebagai berikut:

“We define an agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent...”

Dari definisi tersebut, hubungan agensi dapat dijelaskan sebagai sebuah kontrak antara satu atau lebih pihak (prinsipal) terhadap pihak lain sebagai agen

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



untuk melakukan jasa atau layanan atas nama prinsipal termasuk melibatkan agen menjadi pihak yang berwenang untuk mengambil keputusan.

Serupa dengan apa yang diungkapkan oleh Jensen & Meckling (1976), Ross (1973) juga menyatakan bahwa hubungan keagenan muncul di antara dua (atau lebih) pihak dimana salah satu pihak ditunjuk sebagai agen yang bertindak sebagai perwakilan untuk pihak lain (*principal*) dalam mengelola kegiatan perusahaan dan proses pengambilan keputusan.

Sementara Eisenhardt (1989) menjelaskan teori keagenan sebagai teori yang berfokus pada penyelesaian dua masalah yang mungkin terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan keagenan. Masalah keagenan yang pertama, timbul karena adanya ketidakselarasan tujuan yang ingin dicapai antara prinsipal dan agen serta kesulitan yang dihadapi oleh prinsipal dalam memastikan tindakan agen termasuk dari segi biaya pengawasan. Masalah keagenan yang kedua, timbul ketika prinsipal dan agen memiliki sudut pandang serta tindakan yang berbeda dalam menangani risiko. Dalam jurnalnya Eisenhardt (1989) juga memperlihatkan tiga asumsi mengenai teori keagenan; pertama adalah asumsi terkait manusia (*people*) yang memiliki kepentingan sendiri, keterbatasan rasionalitas, dan keengganan mengambil risiko; kedua adalah asumsi terkait organisasi (*organization*) di mana ketidakselarasan tujuan dapat terjadi antar anggota dalam organisasi; ketiga adalah asumsi terkait informasi (*information*) yang merupakan suatu komoditas yang dapat diperjualbelikan.

Prinsipal (pemilik) pada dasarnya memiliki keterbatasan dalam mengetahui secara penuh apa yang sebenarnya sudah dikerjakan oleh agen (manajemen) sehingga sulit untuk memastikan apakah manajemen sebagai agen sudah melakukan sesuai dengan apa yang diperlukan. Keterbatasan informasi yang diperoleh prinsipal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(pemilik) pada akhirnya akan menimbulkan masalah terkait dengan asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan suatu keadaan di mana salah satu pihak lebih banyak mengetahui informasi dibanding pihak lain atau dapat dikatakan terjadi ketidakseimbangan perolehan informasi antara penyedia dan pengguna informasi (Ramadani, 2017).

Menurut (Scott, 2015: 137) terdapat dua macam asimetri informasi yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* merupakan kondisi di mana manajemen mengetahui lebih banyak informasi terkait fakta yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dibandingkan dengan investor pihak luar, sementara *moral hazard* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen namun tidak diketahui sepenuhnya oleh pemilik di mana kegiatan tersebut secara etika atau norma mungkin tidak layak untuk dilakukan. Permasalahan asimetri informasi antara dua pihak yang terlibat (dalam hal ini manajemen dan pemilik) dapat diatasi melalui pengungkapan informasi secara luas untuk menyelaraskan informasi yang diperoleh kedua pihak tersebut.

Selain permasalahan asimetri informasi, konflik antara prinsipal dan agen juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dalam upaya mengatasi konflik tersebut terdapat biaya keagenan (*agency cost*) yang terdiri dari *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual loss* (Jensen & Meckling, 1976). *Monitoring cost* merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membatasi perilaku menyimpang oleh agen. *Bonding cost* merupakan biaya untuk memastikan bahwa agen tidak akan mengambil tindakan yang dapat membahayakan prinsipal atau jika sampai tindakan yang membahayakan itu terjadi agen harus memastikan adanya kompensasi terhadap prinsipal. *Residual loss* merupakan biaya terkait berkurangnya kesejahteraan prinsipal akibat konflik dalam hubungan agensi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* merupakan teori yang dimaksudkan untuk menjelaskan sekaligus mengarahkan struktur dan prosedur yang perlu diterapkan dalam mempertahankan keberlangsungan perusahaan (Donaldson & Preston, 1995). *Stakeholder* sendiri dapat didefinisikan sebagai karyawan, kreditor, pelanggan, *supplier*, dan komunitas yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan (Freeman, 1994). Pemahaman lain mengenai *stakeholder* datang dari Clarkson (1995) yang menyebutkan *stakeholder* sebagai pihak atau kelompok yang memiliki (menyatakan) kepemilikan, hak, maupun kepentingannya dalam sebuah perusahaan beserta aktivitasnya, baik di masa lampau, masa sekarang, atau bahkan masa yang akan datang.

Dalam menjalankan usahanya, keberhasilan perusahaan bergantung pada seberapa baik hubungan yang dibangun oleh perusahaan dengan *stakeholder* (pelanggan, *supplier*, kreditor, dan lainnya) yang akan membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Freeman & Phillips (2002) dalam jurnalnya. Pemakaian sumber daya yang dimiliki perusahaan termasuk di dalamnya sumber daya ekonomi akan dikendalikan oleh *stakeholder* (Wardhani & Muid, 2017). Sumber daya ekonomi yang dikendalikan oleh *stakeholder* akan mendorong perusahaan untuk memenuhi keinginan *stakeholder*, semakin besar kekuatan *stakeholder* maka semakin besar juga usaha perusahaan dalam mengupayakan kepentingan *stakeholder*.

Terkait dengan teori ini, aktivitas sosial perusahaan dalam bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial menjadi bukti partisipasi perusahaan dalam rangka mencapai kepuasan baik kepuasan pelanggan, *supplier*, maupun masyarakat sekitar. Selain berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial, pengungkapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



informasi terkait kegiatannya juga menjadi sesuatu yang dituntut oleh *stakeholder* sebagai bentuk pengkomunikasian yang diwujudkan dalam penyajian laporan yang berkualitas (Algfaiz & Aryati, 2019).

c. Teori Legitimasi

Teori legitimasi didasari oleh meningkatnya kesadaran publik bahwa perusahaan perlu mempertimbangkan dan memastikan bahwa kegiatan operasionalnya dapat diterima oleh masyarakat secara luas (Wilmshurst & Frost, 2000). Legitimasi dapat didefinisikan sebagai sebuah kondisi yang muncul ketika nilai-nilai yang terdapat pada suatu entitas selaras dengan nilai-nilai dalam masyarakat tempat entitas tersebut berada (Lindblom, 1994 dalam Gray, Kouhy, & Lavers, 1995). Menurut Ghozali & Chariri (2014: 441) teori legitimasi menjadi alasan yang logis terkait pengaruh masyarakat luas terhadap pengalokasian sumber keuangan dan sumber ekonomi perusahaan lainnya.

Keterikatan perusahaan dengan masyarakat sekitarnya menyebabkan perusahaan selalu berusaha untuk menyeimbangkan tindakannya dengan tuntutan masyarakat. O'Donovan (2002) menyatakan bahwa semakin besar pergeseran pandangan masyarakat terhadap bagaimana perusahaan seharusnya bertindak, maka semakin besar juga keinginan perusahaan untuk mengusahakan persiapan terkait pergeseran pandangan sosial tersebut. Upaya perusahaan untuk menyesuaikan pandangannya dengan masyarakat sekitar, memiliki indikasi bahwa perusahaan menyadari pentingnya legitimasi dari masyarakat terhadap keberlangsungan hidup perusahaan (Darmawati & Naser, 2018). Ketika perusahaan melakukan aktivitas yang bertentangan dengan tuntutan dan norma yang berlaku dalam masyarakat, hal ini akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat dan menurunnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



citra perusahaan yang dapat mengancam kedudukan perusahaan. Pada akhirnya perusahaan akan cenderung melakukan kegiatannya dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan lingkungan sekitarnya termasuk melakukan pengungkapan informasi terkait lingkungan untuk melegitimasi tindakannya di mata masyarakat.

Suchman (1995) menjelaskan terdapat tiga jenis legitimasi organisasi yaitu *pragmatic legitimacy*, *moral legitimacy*, dan *cognitive legitimacy*. *Pragmatic legitimacy* merupakan legitimasi yang dilandasi oleh kepentingan publik, dalam legitimasi ini tindakan perusahaan dianggap sebagai dampak dari tuntutan publik yang berpengaruh pada kesejahteraan publik tersebut, sehingga dapat dikatakan penilaian terhadap *pragmatic legitimacy* didasari oleh manfaat yang dihasilkan. *Moral legitimacy* merupakan legitimasi yang dilandasi oleh norma-norma yang berlaku, hal ini mengindikasikan bahwa penilaian terhadap legitimasi ini bukan berdasarkan manfaat yang dihasilkan, namun berdasarkan sesuatu yang benar untuk dilakukan. *Cognitive legitimacy* merupakan legitimasi yang dilandasi oleh komprehensibilitas dan penyesuaian struktur kognitif dalam masyarakat yang sudah diterima apa adanya.

Pada dasarnya dalam praktik legitimasi terdapat perbedaan nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Perbedaan nilai-nilai ini dapat menimbulkan *legitimacy gaps*. Pada gambar 2.1 area Y dan Z menunjukkan keberadaan *legitimacy gaps*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

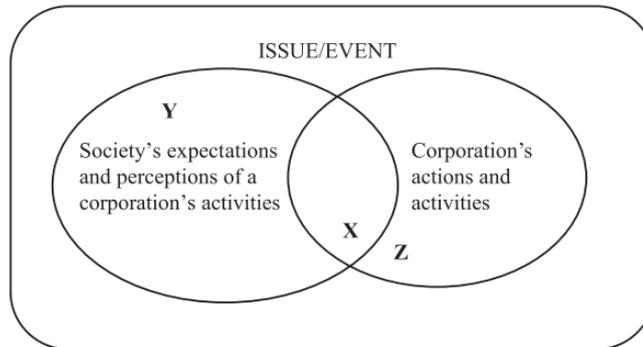
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2. 1

Legitimacy Gaps



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Wartick & Mahon (1994) dalam penelitiannya menyebutkan tiga alasan terjadinya *legitimacy gaps*, yaitu:

- (1) Kinerja perusahaan berubah ketika harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tetap sama.
- (2) Harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan telah berubah ketika kinerja perusahaan tetap sama.
- (3) Baik kinerja perusahaan maupun harapan masyarakat sama-sama mengalami perubahan namun keduanya berubah ke arah yang berbeda, atau ke arah yang sama tetapi dalam selang waktu yang berbeda.

Perusahaan dalam menjalankan kegiatannya diharapkan dapat meminimalisir *legitimacy gaps* tersebut dengan menerapkan pengungkapan informasi guna menyelaraskan sudut pandang perusahaan dan masyarakat (O'Donovan, 2002). Salah satu bentuk pengungkapan yang diperlukan adalah laporan keberlanjutan, Kurniawan (2017) berpendapat bahwa laporan keberlanjutan merupakan sesuatu yang penting untuk disediakan oleh perusahaan guna mempertahankan keberlangsungan perusahaan.

Dalam pembahasan lebih lanjut mengenai teori legitimasi, pengungkapan tanggung jawab sosial juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi *legitimacy gaps* yang terjadi. Tanggung jawab sosial sebagai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tindakan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas dan melestarikan lingkungan dianggap sebagai kontribusi perusahaan dalam memenuhi tuntutan publik, sehingga pengungkapan mengenai kegiatan tanggung jawab sosial dipandang sebagai hal yang diperlukan.

2. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Dalam PSAK No.1 Paragraf 9 (2018: 1.3) laporan keuangan didefinisikan sebagai suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Definisi lain dari laporan keuangan juga diungkapkan oleh Kieso et al. (2018: 1-4) yang menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang menjadi saran bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangannya pada pihak di luar perusahaan, yang biasanya terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba/rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan. Para pemangku kepentingan seperti investor dan kreditor dapat menggunakan informasi dalam laporan keuangan untuk membantunya dalam pengambilan keputusan.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut PSAK No.1 Paragraf 9 (2018: 1.3) adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Sementara dalam Kieso et al. (2018: 1-6) laporan keuangan memiliki tujuan umum untuk menyediakan informasi bagi banyak penggunanya, seperti pemegang saham, kreditor, pemasok, karyawan, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pemerintah sehingga pihak-pihak tersebut dapat memahami kinerja keuangan serta kinerja lain dari suatu entitas.

c. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

c. Komponen Laporan Keuangan

Menurut PSAK No.1 Paragraf 10 (2018: 1.3) komponen laporan keuangan

terdiri dari :

- (1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode.
- (2) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode.
- (3) Laporan perubahan ekuitas selama periode.
- (4) Laporan arus kas selama periode.
- (5) Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain.
- (6) Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A.
- (7) Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai paragraf 40A-40D.

d. Karakteristik Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif dari laporan keuangan dapat digunakan untuk mengidentifikasi informasi mana yang lebih berguna dan kurang berguna dalam pengambilan keputusan (Kieso et al., 2018: 2-6). Melalui identifikasi tersebut pengungkapan informasi pada pelaporan keuangan dapat menjadi lebih bermutu dan bermanfaat bagi para pengguna laporan. Karakteristik kualitatif sendiri terdiri

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



atas kualitas dasar (*fundamental qualities*) dan kualitas penunjang (*enhancing qualities*). Berikut ini adalah karakteristik dari kualitas dasar:

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(1) Relevansi

Relevansi merupakan salah satu kualitas fundamental yang menjadikan informasi akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan. Informasi dapat dikatakan relevan apabila memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Berikut ini adalah tiga syarat informasi dapat dikatakan relevan:

- (a) Memiliki nilai prediktif (*predictive value*), artinya informasi keuangan sebagai *input* dalam proses prediksi memiliki nilai (*value*) yang digunakan oleh investor untuk membangun ekspektasi mereka mengenai masa yang akan datang.
- (b) Memiliki nilai yang terkonfirmasi (*confirmatory value*), artinya informasi yang relevan dapat membantu penggunaannya untuk mengkonfirmasi atau memperbaiki dugaan awalnya.
- (c) Memiliki materialitas (*materiality*), artinya informasi bersifat material (penting), di mana ketika informasi tidak disajikan atau salah saji maka hal tersebut dapat mempengaruhi pengguna dalam membuat keputusan.

(2) *Faithful Representation*

Faithful representation merupakan serangkaian angka-angka dan deskripsi yang terdapat dalam laporan keuangan di mana hal tersebut benar-benar ada atau terjadi. Informasi dapat dikatakan *faithfully represent* (dinyatakan secara benar) apabila:

- (a) Lengkap (kelengkapan/*completeness*), artinya semua informasi yang diperlukan telah tersedia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(b) Netral (*neutrality*), artinya perusahaan tidak menyediakan informasi yang hanya berpihak pada kepentingan satu pengguna.

(c) Bebas dari kesalahan (*free from error*), informasi yang bebas dari kesalahan akan menjadi lebih akurat.

Selanjutnya akan dijabarkan karakteristik dari kualitas penunjang yang menjadi pelengkap kualitas dasar dan dapat membedakan kebergunaan informasi sebagai berikut:

- (1) Dapat dibandingkan (*comparability*), artinya informasi yang diukur dan dilaporkan melalui cara yang serupa untuk perusahaan yang berbeda diharapkan dapat diperbandingkan satu sama lain. Karakteristik ini memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan peristiwa ekonomi antar perusahaan.
- (2) Dapat diverifikasikan (*verifiability*), artinya ketika informasi yang tersedia diukur dengan metode yang sama akan menghasilkan hasil yang kurang lebih sama.
- (3) Ketepatan waktu (*timeliness*), artinya informasi tersedia bagi pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pembuatan keputusan.
- (4) Dapat dipahami (*understandability*), artinya informasi dapat dengan mudah dipahami oleh penggunanya secara umum. Kualitas ini akan meningkat ketika informasi terklasifikasi, tergolongkan, dan tersajikan secara jelas dan ringkas.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e. Pengguna Laporan Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK - Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan PSAK (2014: 3) menyatakan bahwa pengguna laporan keuangan meliputi investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah dan masyarakat. Setiap pengguna memiliki kebutuhan informasi yang berbeda, di antaranya:

(1) Investor

Investor dan penasihat investor memerlukan informasi yang berkenaan dengan risiko yang melekat, perkembangan hasil atas investasi yang telah ditanamkan, serta kemampuan entitas membayar dividen. Informasi tersebut dibutuhkan untuk membuat keputusan berkaitan dengan membeli, menahan, dan menjual investasi yang dimiliki.

(2) Karyawan

Karyawan dan kelompok perwakilan karyawan membutuhkan informasi mengenai stabilitas perusahaan, profitabilitas perusahaan, penilaian atas kemampuan perusahaan dalam memberi insentif, imbalan pasca kerja, dan kesempatan kerja.

(3) Pemberi pinjaman

Pemberi pinjaman mempunyai kepentingan atas informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam membayar pinjaman serta bunga pada saat jatuh tempo.

(4) Pemasok dan kreditor usaha lainnya

Pemasok dan kreditor usaha lainnya mempunyai kepentingan atas informasi kemampuan perusahaan untuk membayar jumlah terhutang pada saat jatuh tempo.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(5) Pelanggan

Pelanggan mempunyai kepentingan atas informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama pelanggan yang terlibat dalam perjanjian jangka panjang dan pelanggan yang mempunyai ketergantungan pada perusahaan.

(6) Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga memiliki kepentingan berkenaan dengan alokasi sumber daya sehingga memerlukan informasi atas aktivitas entitas. Pemerintah membutuhkan informasi tersebut untuk mengatur aktivitas entitas, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

(7) Masyarakat

Masyarakat mempunyai kepentingan karena perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai bidang. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi *trend* dan perkembangan terakhir dari entitas dan aktivitas-aktivitasnya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

3. Laporan Tahunan

a. Pengertian dan Tujuan Laporan Tahunan

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.04/2016 pasal 1 ayat (1) laporan tahunan didefinisikan sebagai laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan publik dalam kurun waktu satu tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Maharani & Budiasih (2016) laporan tahunan merupakan media informasi terkait kinerja keuangan dan informasi lainnya bagi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pihak-pihak di luar perusahaan yang menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Sejalan dengan yang dikatakan Maharani & Budiasih (2016); Nugraheni (2018) melihat laporan tahunan sebagai sarana penyajian informasi oleh manajemen mengenai kondisi perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat. Tujuan diterbitkannya laporan tahunan adalah untuk menyampaikan kepada pihak yang berkepentingan terkait dokumentasi mengenai operasi dan kinerja perusahaan selama satu tahun.

b. Komponen Laporan Tahunan

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.04/2016 pasal 4 laporan tahunan wajib paling sedikit memuat:

- (1) Ikhtisar data keuangan penting.
- (2) Informasi saham (jika ada).
- (3) Laporan Direksi.
- (4) Laporan Dewan Komisaris.
- (5) Profil Emiten atau perusahaan publik.
- (6) Analisis dan pembahasan manajemen,
- (7) Tata kelola Emiten atau perusahaan publik.
- (8) Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau perusahaan publik.
- (9) Laporan Keuangan tahunan yang telah diaudit.
- (10) Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)

Ⓒ Pada awalnya pelaporan keberlanjutan merupakan suatu hal yang bersifat sukarela, sehingga tidak semua perusahaan akan menyediakan laporan keberlanjutan (Hamudiana & Achmad, 2017). Akan tetapi beberapa tahun belakangan ini khususnya di Indonesia, gagasan akan pentingnya laporan keberlanjutan menjadi hal yang banyak diperbincangkan, sehingga pada tanggal 27 Juli 2017 OJK secara resmi mengeluarkan peraturan pertama mengenai laporan keberlanjutan dalam bentuk POJK No.51/POJK.03/2017 (MajalahCSR.id, 2017).

Berdasarkan POJK No.51/POJK.03/2017 pasal 1 ayat (13) laporan keberlanjutan adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis keberlanjutan. Kualitas laporan keberlanjutan dapat ditingkatkan dengan menetapkan satu bagian dalam perusahaan untuk memperhatikan isu-isu terkait keberlanjutan serta melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaporan sekaligus pelaksanaan terkait tanggung jawab lingkungan dan sosial (Indyanti & Zulaikha, 2017).

5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

a. Pengertian Tanggung Jawab Sosial

Said (2018: 23) dalam bukunya mendefinisikan pengungkapan tanggung jawab sosial sebagai bentuk usaha yang dilakukan oleh perusahaan guna menaikkan citranya di mata masyarakat dengan menjalankan sejumlah program yang berhubungan dengan kesejahteraan baik yang bersifat eksternal maupun internal. Di sisi lain Maulidiana (2018: 10) membagi pengertian tanggung jawab sosial ke dalam pengertian luas dan sempit, dalam pengertian luas tanggung jawab sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berkaitan dengan keberlanjutan ekonomi yang menjadi hal penting bagi akuntabilitas perusahaan terhadap masyarakat dan negara, sementara dalam pengertian sempit tanggung jawab sosial merupakan bentuk keterlibatan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pemangku kepentingan guna menjamin keberlangsungan perusahaan.

Tanggung jawab sosial hakikatnya merupakan bentuk penerapan teori legitimasi dan *stakeholder*, di mana perusahaan berupaya menjalankan tuntutan masyarakat dan tekanan dari para pemangku kepentingan guna mempertahankan posisi perusahaan. Wang, Tong, Takeuchi, & George (2016) mengidentifikasi peran tanggung jawab sosial (CSR) sebagai pusat identitas perusahaan sebagai agen pembangunan ekonomi dan institusi sosial dalam pasar di mana perusahaan beroperasi.

b. Konsep *Triple Bottom Line*

Praktik tanggung jawab sosial merupakan bentuk kesadaran publik terhadap pentingnya kondisi sosial dan lingkungan. Elkington (1997) dalam bukunya yang berjudul “*Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*” memperkenalkan konsep *triple bottom line* yang menjadi landasan bagi penerapan tanggung jawab sosial. Pada buku tersebut, Elkington mengungkapkan bahwa selain berorientasi pada laba (*profit*), perusahaan juga perlu untuk memperhatikan aspek sosial termasuk kesejahteraan masyarakat di dalamnya (*people*) dan kontribusi terhadap lingkungan (*planet*). Díaz & Sedano (2018) berpendapat jika investor tidak hanya mempertimbangkan faktor ekonomi dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan lingkungan maka pengambilan keputusan yang dilakukan akan menjadi lebih akurat.

Berikut ini akan dijelaskan konsep *triple bottom line* dari masing-masing aspek:

(1) *Profit*

Dari segi keuangan perusahaan merupakan organisasi yang senantiasa berorientasi pada keuntungan. Schulz & Flanigan (2016) menjelaskan bahwa perusahaan perlu memperhatikan tingkat produktivitas dan pengembalian atas aset yang digunakan sehingga dapat merancang program guna meminimalkan biaya yang dikeluarkan serta penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Lebih lanjut Schulz & Flanigan (2016) berpendapat bahwa dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya perusahaan perlu berfokus pada aktivitas keuangannya yang mengoptimalkan pendapatan perusahaan.

(2) *People*

Parinduri, Marlanfar, & Halim (2019) melihat aspek sosial (*people*) sebagai bentuk keterlibatan perusahaan terhadap masyarakat dan seberapa besar manfaat perusahaan bagi masyarakat tersebut. Kegiatan sosial perusahaan dianggap sebagai cara untuk “memberikan kembali” kepada masyarakat atas sumber daya yang digunakan oleh perusahaan. Pada hakikatnya tanggung jawab sosial merupakan hubungan timbal balik perusahaan dan masyarakat di mana dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat perusahaan juga pada akhirnya memperoleh keuntungan bagi kepentingannya. Schulz & Flanigan (2016) dalam penjelasannya mengenai komponen sosial menyatakan bahwa dampak sosial yang diberikan perusahaan dapat diukur melalui pelatihan karyawan, akses sumber daya sosial, kesehatan



dan keselamatan kerja karyawan, serta kinerja sosial bagi pelanggan dan pemasok.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(3) *Planet*

Aspek lingkungan, menuntut perusahaan untuk mempertimbangkan baik lingkungan hidup maupun lingkungan tak hidup. Pelestarian lingkungan khususnya oleh perusahaan yang kegiatannya memiliki kemungkinan untuk merusak lingkungan diperlukan untuk menjamin bahwa generasi mendatang masih dapat menikmati sumber daya alam dan lingkungan yang baik Alhaddi (2015). Upaya perusahaan dalam mengurangi pemakaian energi dan sumber daya alam lainnya nyatanya dapat memiliki dampak finansial bagi perusahaan, di mana melalui upaya penghematan tersebut perusahaan dapat mengefisienkan biaya yang dikeluarkannya yang jika ditelusuri lebih lanjut menjadi nilai tambah bagi perusahaan baik di mata *stakeholder*, *shareholder*, maupun masyarakat sekitar.

c. Indikator Tanggung jawab sosial

(1) GRI-G4

Global Reporting Initiative atau yang dikenal dengan istilah GRI, merupakan organisasi internasional independen yang mempelopori laporan keberlanjutan sejak tahun 1997 (www.globalreporting.org). Dalam GRI 101: Landasan (2016: 3) dikatakan bahwa pada tahun 1987, Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan menggagaskan pembangunan keberlanjutan, yang digambarkan sebagai sebuah upaya pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Sebagai bentuk realisasi pembangunan keberlanjutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ditetapkan sebuah laporan keberlanjutan yang menjadi bentuk pelaporan organisasi secara transparan mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosialnya. Secara lebih lanjut pedoman pelaporan keberlanjutan di atur dalam GRI-G4 yang memiliki indikator tanggung jawab sosial sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Indikator Tanggung Jawab Sosial GRI-G4

Indikator Kinerja : Ekonomi	
Kategori 1 : Ekonomi	
Aspek : Kinerja Ekonomi	
G4-EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
G4-EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim
G4-EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti
G4-EC4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
Aspek : Keberadaan Pasar	
G4-EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (<i>entity level</i>) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan
G4-EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan
Aspek : Dampak Ekonomi Langsung	
G4-EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan
G4-EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
Aspek : Praktik Pengadaan	
G4-EC9	Perbandingan pembelian dari pemasok lokal di lokasi operasional yang signifikan

Indikator : Lingkungan	
Kategori 2 : Lingkungan	
Aspek : Bahan	
G4-EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume
G4-EN2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang
Aspek : Energi	
G4-EN3	Konsumsi energi dalam organisasi
G4-EN4	Konsumsi energi di luar organisasi

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

G4-EN5	Intensitas energi
G4-EN6	Pengurangan konsumsi energi
G4-EN7	Pengurangan kebutuhan energi pada produk dan jasa
Aspek : Air	
G4-EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
G4-EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
G4-EN10	Persentase dan total volume air yang di daur ulang dan digunakan kembali
Aspek : Keanekaragaman Hayati	
G4-EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola di dalam, atau yang berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
G4-EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
G4-EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan
G4-EN14	Jumlah total spesies dalam IUCN red list dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan
Aspek : Emisi	
G4-EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (Cakupan 1)
G4-EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung (Cakupan 2)
G4-EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3)
G4-EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
G4-EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
G4-EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO)
G4-EN21	NOX, SOX, dan emisi udara signifikan lainnya
Aspek : Efluen dan Limbah	
G4-EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
G4-EN23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
G4-EN24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan
G4-EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi Basel lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut diimpor, diekspor, atau diolah dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional
G4-EN26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari air buangan dan limpasan dari organisasi
Aspek : Produk dan Jasa	
G4-EN27	Tingkat Mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

G4-EN28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang di reklamasi menurut kategori
Aspek : Kepatuhan	
G4-EN29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter karena ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan
Aspek : Transportasi	
G4-EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi, dan pengangkutan tenaga kerja
Aspek : Lain-lain	
G4-EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
Aspek : Asesmen Pemasok atas Lingkungan	
G4-EN32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
G4-EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Aspek : Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan	
G4-EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi

Kategori : Sosial	
Sub-Kategori: Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja	
Aspek : Kepegawaian	
G4-LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah
G4-LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purna waktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan
G4-LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut gender
Aspek : Hubungan Industrial	
G4-LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama
Aspek : Kesehatan dan Keselamatan Kerja	
G4-LA5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen-pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja
G4-LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

G4-LA7	Pekerja yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka
G4-LA8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja
Aspek : Pelatihan dan Pendidikan	
G4-LA9	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender, dan menurut kategori karyawan
G4-LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti
G4-LA11	Persentase karyawan yang menerima <i>review</i> kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan
Aspek : Keberagaman dan Kesetaraan Peluang	
G4-LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya
Aspek : Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-Laki	
G4-LA13	Rasio gaji dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
Aspek : Asesmen Pemasok atas Praktik Ketenagakerjaan	
G4-LA14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan
G4-LA15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Aspek : Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan	
G4-LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
Sub-Kategori: Hak Asasi Manusia	
Aspek : Investasi	
G4-HR1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia
G4-HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan yang dilatih
Aspek : Non-diskriminasi	
G4-HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang diambil
Aspek : Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Sama	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

G4-HR4	Operasi dan pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau berisiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut
Aspek : Pekerja Anak	
G4-HR5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif
Aspek : Pekerja Paksa atau Wajib Kerja	
G4-HR6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja
Aspek : Praktik Pengamanan	
G4-HR7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi
Aspek : Hak Adat	
G4-HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil
Aspek : Asesmen Pemasok atas Praktik Ketenagakerjaan	
G4-HR9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan reuiu atau asesmen dampak hak asasi manusia
Aspek : Asesmen Pemasok atas Hak Asasi Manusia	
G4-HR10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia
G4-HR11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Aspek : Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia	
G4-HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal
Sub-Kategori : Masyarakat	
Aspek : Masyarakat Lokal	
G4-SO1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan
G4-SO2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal
Aspek : Anti Korupsi	
G4-SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi
G4-SO4	Komunikasi pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi
G4-SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Aspek : Kebijakan Publik	
G4-SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat
Aspek : Anti Persaingan	
G4-SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait anti persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya
Aspek : Kepatuhan	
G4-SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan
Aspek : Asesmen Pemasok atas Dampak pada Masyarakat	
G4-SO9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria dampak terhadap masyarakat
G4-SO10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantau pasokan dan tindakan yang diambil
Aspek : Mekanisme Pengaduan Dampak terhadap Masyarakat	
G4-SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
Sub-Kategori : Tanggung Jawab atas Produk	
Aspek : Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan	
G4-PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan yang dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
G4-PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil
Aspek : Pelabelan Produk dan Jasa	
G4-PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang dihapuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis
G4-PR4	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil
G4-PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan
Aspek : Komunikasi Pemasaran	
G4-PR6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan
G4-PR7	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil
Aspek : Privasi Pelanggan	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



G4-PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
Aspek : Kepatuhan	
G4-PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2) ISO 26000

ISO 26000 merupakan sebuah pedoman secara global yang baru diterbitkan pada November 2010 mengenai tanggung jawab sosial (*social responsibility*) (Moratis & Cochius, 2017: viii). *Website* resmi ISO Indonesia menyebutkan terdapat tujuh isu pokok yang dibahas dalam ISO 26000 *Guidance Standard on Social Responsibility* yaitu pengembangan masyarakat, konsumen, praktik kegiatan institusi yang sehat, lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, dan organisasi pemerintahan (www.isoindocenter.com). Dalam pedoman tersebut tanggung jawab sosial diartikan sebagai sebuah tanggung jawab organisasi atas akibat yang ditimbulkan dari kegiatan dan keputusannya terhadap masyarakat dan lingkungan, dengan berperilaku secara transparan.

Sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya, perusahaan perlu konsisten terhadap pembangunan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan kepentingan dari para *stakeholder*, beroperasi sesuai hukum dan norma internasional, serta terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi. Berdasarkan ISO 26000 terdapat delapan prinsip tanggung jawab sosial yang meliputi kepatuhan kepada hukum, menghormati organisasi internasional, menghormati *stakeholder* beserta kepentingannya, akuntabilitas, transparansi, beretika, melakukan pencegahan, dan menghormati hak asasi manusia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)

PROPER merupakan sebuah program yang bermula dari kegiatan bernama PROKASIH (program kali bersih). Melalui PROKASIH terdapat suatu pembelajaran penting bahwa pengelolaan lingkungan konvensional tidak efektif dalam mendorong pengelolaan lingkungan oleh perusahaan sehingga terciptalah PROPER (www.menlhk.go.id). PROPER dikembangkan melalui prinsip dasar bahwa pihak yang terlibat dalam PROPER bersifat selektif yaitu untuk sektor industri yang berdampak langsung terhadap lingkungan dan memiliki kepedulian pada citra dan reputasinya.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 12 dan 13 menyebutkan peringkat kinerja atau kegiatan PROPER yang terdiri dari:

- a) Emas untuk penanggung jawab usah dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan hidup dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.
- b) Hijau untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup melebihi ketaatan melalui pelaksanaan sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien dan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dengan baik.
- c) Biru untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

- d) Merah untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidupnya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- e) Hitam untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. Pengungkapan

a. Pengertian Pengungkapan

Evans (2003) dalam Suwardjono (2014: 578) membatasi pengertian pengungkapan hanya pada hal-hal yang menyangkut pelaporan keuangan dan mengartikan pengungkapan sebagai berikut:

“Disclosure means supplying information in the financial statement, including the statements themselves, the notes to the statements, and the supplementary disclosure associated with the statements...”

Dari definisi di atas terlihat bahwa pengungkapan merupakan bentuk penyajian informasi dalam bentuk laporan dan informasi tambahan lainnya. FASB dalam Statement of Financial Accounting Concepts No.1 (2008: 5) pengungkapan dipandang sebagai penyediaan informasi melebihi yang dapat disampaikan dalam laporan keuangan formal, FASB juga menyatakan bahwa beberapa informasi penting lebih baik disediakan dalam bentuk laporan keuangan, namun beberapa yang lain lebih baik atau hanya dapat disediakan melalui pelaporan keuangan.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie





b. Fungsi dan Tujuan Pengungkapan

© Suwardjono (2014: 580) menyatakan bahwa secara umum tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Pasar modal merupakan sarana utama pemenuhan dana dari masyarakat dan karenanya pengungkapan dapat diwajibkan untuk tujuan melindungi, informatif, atau melayani kebutuhan khusus. Berikut ini penjelasan secara singkat mengenai tiga tujuan utama dilakukannya pengungkapan:

(1) Tujuan melindungi

Tujuan melindungi didasari oleh pemahaman bahwa terdapat pengguna (*user*) yang tidak cukup cangguh (pengguna naif) yang perlu untuk dilindungi melalui pengungkapan informasi yang tidak mungkin diperoleh atau dikelolanya sendiri, agar pemakai tersebut dapat memahami substansi ekonomi dalam laporan keuangan.

(2) Tujuan Informatif

Tujuan informatif didasari oleh pemahaman bahwa pengguna (*user*) memiliki tingkat kemampuan tertentu sehingga pengungkapan dimaksudkan untuk menyediakan informasi guna meningkatkan keefektifan pengambilan keputusan oleh pengguna (*user*).

(3) Tujuan kebutuhan khusus

Tujuan kebutuhan khusus pada dasarnya menggabungkan tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Informasi yang perlu diungkapkan kepada publik dibatasi pada informasi yang dianggap bermanfaat bagi pengguna (*user*) tertentu, sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

c. Keluasan dan Kerincian Pengungkapan

Evans (2003: 336) dalam Suwardjono (2014: 581) mengidentifikasi tingkat pengungkapan menjadi tiga yaitu:

(1) Tingkat Memadai (*Adequate Disclosure*)

Tingkat memadai adalah batas bawah (tingkat minimum) pengungkapan informasi yang harus disediakan agar seluruh laporan keuangan tidak menimbulkan penyimpangan dalam pengambilan keputusan yang dituju.

(2) Tingkat Wajar atau Etis (*Fair or Ethical Disclosure*)

Tingkat wajar adalah tingkat pengungkapan tertentu yang perlu dicapai guna menyeimbangkan perlakuan atau pelayanan informasional kepada semua pihak terkait. Hal ini dimaksudkan agar tidak pihak yang merasa kurang dirugikan akibat minimnya informasi yang diperoleh.

(3) Tingkat Penuh (*Full Disclosure*)

Tingkat penuh adalah tingkat pengungkapan yang menuntut penyediaan seluruh informasi yang terkait dengan pengambilan keputusan tertentu.

Tingkat pengungkapan yang tepat perlu untuk dilakukan agar tidak terlalu banyak atau sedikit informasi yang tersedia sehingga menjadi situasi yang kurang menguntungkan bagi salah satu pihak (penyedia atau pengguna). Penetapan kriteria terkait batasan pengungkapan menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Suwardjono (2014: 581) menetapkan pertimbangan biaya dan manfaat sebagai batas atas pengungkapan serta materialitas sebagai batas bawahnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Pengungkapan Wajib dan Sukarela

Ⓒ Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang sifatnya harus dilakukan berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) (Wulandari & Atmini, 2018). Maharani & Budiasih (2016) menyatakan pengungkapan wajib sebagai pengungkapan minimum mengenai informasi yang memang seharusnya diungkapkan oleh setiap perusahaan. Sementara pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi melebihi dari apa yang diwajibkan dalam standar akuntansi ataupun peraturan oleh badan pengawas (Suwardjono 2014: 583).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu sekaligus memperlihatkan efektivitas kinerja manajemen (Kasmir, 2018: 196). Pernyataan serupa mengenai profitabilitas juga diungkapkan oleh Andhari & Sukartha (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas dapat mencerminkan keefektifan manajemen dalam mengelola perusahaan sehingga tujuan pemilik perusahaan dapat tercapai. Profitabilitas suatu perusahaan menurut Brigham & Houston (2018: 118-120), dapat diukur dengan beberapa indikator rasio berikut:

a. Operating Margin

Operating margin digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui persentase laba kotor dari penjualan perusahaan.

$$\text{Operating margin} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Sales}}$$

Keterangan:

EBIT = *Earning Before Interest and Tax*



b. *Profit Margin*

Profit margin digunakan untuk mengetahui persentase laba bersih dari penjualan setelah dikurangi pajak.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Sales}}$$

c. *Return On Total Assets (ROA)*

Return On Investment (ROI) atau *Return On Assets (ROA)* menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Assets}}$$

d. *Return On Common Equity (ROE)*

Return On Equity (ROE) mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Common Equity}}$$

e. *Return on Invested Capital (ROIC)*

Return on Invested Capital mengukur total pengembalian yang disediakan perusahaan bagi para investor.

$$\text{ROIC} = \frac{\text{EBIT} (1 - T)}{\text{Total Invested Capital}}$$

f. *Basic Earning Power (BEP) Ratio*

Basic Earning Power (BEP) Ratio mengindikasikan kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba operasi.

$$\text{Basic Earning Power} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Assets}}$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



8. Leverage

Menurut Felicia & Rasmini (2015); Cahyono, Andini, & Raharjo (2016) *leverage* merupakan gambaran proporsi total aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Melalui analisis *leverage*, keputusan pendanaan yang tepat dapat dilakukan oleh perusahaan. Tingkat utang (*leverage*) yang semakin tinggi menunjukkan kewajiban perusahaan yang semakin besar kepada kreditor. Kewajiban perusahaan terhadap kreditor yang terlalu besar dapat menimbulkan risiko berupa kesulitan perusahaan dalam melunasi utangnya.

Kasmir (2018: 155-163) menyebutkan beberapa rasio yang dapat digunakan dalam mengukur *leverage*:

a. *Debt to asset ratio* (DAR)

DAR merupakan rasio utang untuk membandingkan total utang terhadap total aktiva.

$$DAR = \frac{\text{Total debt}}{\text{Total assets}}$$

b. *Debt to equity ratio* (DER)

DER merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang terhadap ekuitas.

$$DER = \frac{\text{Total utang (debt)}}{\text{Total ekuitas (equity)}}$$

c. *Long term Debt to Equity Ratio* (LTDtER)

LTDtER merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan ekuitas.

$$LTDtER = \frac{\text{Long term debt}}{\text{Equity}}$$

d. *Times Interest Earned*

Times Interest Earned merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Biaya bunga (interest)}}$$

C e. *Fixed Charge Coverage (FCC)*

FCC merupakan rasio yang serupa dengan *times interest earned ratio*, namun rasio ini hanya dilakukan apabila perusahaan memiliki utang jangka panjang atau menyewa aset berdasarkan kontrak sewa.

$$FCC = \frac{\text{EBIT} + \text{Interest} + \text{Lease}}{\text{Interest} + \text{Lease}}$$

9 **Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial adalah situasi di mana pihak manajemen sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Poluan & Nugroho, 2015). Definisi lain diungkapkan oleh Paek, Xiao, Lee, & Song (2013); Fidiana & Handayani (2015); Majumder, Akter, & Li (2017); Fadillah (2017); Yolanda, Hapsari, Akbar, & Herawaty (2019) yang menyatakan kepemilikan manajerial sebagai persentase kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang terdiri dari manajer, direksi dan dewan komisaris yang berperan aktif dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan. Semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial maka akan semakin tinggi pula kewaspadaan manajemen terhadap kondisi perusahaan. Hal tersebut disebabkan pihak manajemen yang bertindak sebagai pengelola perusahaan sekaligus juga memiliki kepentingan sebagai pemegang saham, sehingga segala keputusan yang diambil oleh manajemen dengan tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi akan cenderung lebih berpihak pada kepentingannya sebagai pemegang saham.

Teori agensi Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa konflik muncul ketika prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen) memiliki sudut pandang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang berbeda. Dengan adanya kepemilikan manajerial di mana manajemen juga berperan sebagai pemegang saham, maka manajemen akan mempertimbangkan segala tindakannya bukan hanya dari sisi pelaksana tetapi juga dari sisi pemilik perusahaan, sehingga hal tersebut akan menyelaraskan pandangan kedua pihak.

Aniktia & Khafid (2015); Mardiyatnolo, Amrizal, Julaeha, & Setiawati (2016); Prasetyo & Pramuka (2018) dalam penelitiannya mengukur kepemilikan manajerial dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar. Indikator tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham pihak manajerial}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\%$$

10. Komisaris Independen

Menurut Liao, Luo, & Tang (2015); Cahyadi, Purwanti, & Mardiaty (2018) komisaris independen adalah anggota dewan komisaris dari luar perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan manajemen ataupun terlibat aktif dalam operasional perusahaan di mana komisaris independen ditempatkan. Komisaris independen dianggap dapat meningkatkan fungsi pengawasan pada manajemen perusahaan. Keterlibatan komisaris independen dalam manajemen perusahaan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan kepatuhan manajemen perusahaan, sekaligus menjadi mediator ketika terjadi permasalahan agensi antara manajemen dengan pemegang saham (Rosidy & Nugroho, 2019).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek pada pasal 19 menyatakan bahwa:

- (1) Perusahaan Efek wajib memiliki Komisaris Independen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang, persentase jumlah Komisaris Independen wajib paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Dalam peraturan yang sama pada pasal 22 disebutkan beberapa persyaratan mengenai komisaris independen yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan Efek tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk peningkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan Efek pada periode berikutnya.
- b. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Efek.
- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan Efek, anggota dewan komisaris, anggota direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Efek.
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan Efek.

Nugroho & Yulianto (2015); Mokoginta, Karamoy, & Lambey (2018); Yunia (2018); Yuliani (2019) dalam penelitiannya menggunakan rasio dengan membandingkan jumlah komisaris independen terhadap total anggota dewan komisaris, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah dewan komisaris}} \times 100\%$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



11. Komite Audit

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 pasal 1 ayat (7) yang dimaksud dengan komite audit adalah suatu komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Selain bertanggung jawab terhadap dewan komisaris, komite audit juga menjadi salah satu bagian perusahaan yang berintegritas untuk menyusun laporan keuangan perusahaan (Sofia, 2018). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit pasal 2, 3, dan 4 perusahaan publik wajib memiliki komite audit paling sedikit terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar perusahaan publik, di mana kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan komite audit berada di tangan dewan komisaris.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 pasal 7 juga menyebutkan syarat untuk menjadi bagian dari komite audit sebagai berikut:

- a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- e. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
- f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
- h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik.
- i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- j. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik.
- k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tugas dan fungsi komite audit dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

55/POJK.04/2015 pasal 10 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik.
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Rahmawati & Herlambang (2018) dalam penelitiannya mengenai efektivitas komite audit menggunakan jumlah komite audit, independensi komite audit, frekuensi pertemuan, dan pengetahuan keuangan komite audit untuk merepresentasikan efektivitas komite audit. Beberapa penelitian lain juga menggunakan berbagai pengukuran dalam menilai efektivitas komite audit seperti Napitupulu & Meiranto (2015); Restu et al. (2017); Oktamawati (2019) yang menggunakan jumlah anggota komite audit, Istiqomah & Adhariani (2017); Suyono (2018) menggunakan jumlah rapat komite audit, Hasanah, Syam, & Jati (2015) yang menggunakan rata-rata jumlah anggota yang menghadiri rapat, dan Budiman (2015) yang menggunakan independensi komite audit.

12 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu penetapan mengenai besar kecilnya perusahaan (Meidiyustiani, 2016). Semakin besar ukuran perusahaan mencerminkan tahap kedewasaan perusahaan tersebut (Refgia, 2017). Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.46/M-DAG/PER/9/2009 pasal 3, ukuran perusahaan pada SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) diklasifikasikan menjadi tiga yaitu perusahaan kecil, menengah dan besar, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Klasifikasi perusahaan kecil adalah untuk perusahaan dengan aset bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan maksimum Rp 500.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.



- b. Klasifikasi perusahaan menengah adalah untuk perusahaan dengan aset bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai dengan maksimum Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. Klasifikasi perusahaan kecil adalah untuk perusahaan dengan aset bersih lebih dari Rp 10.000.000.000 sampai dengan maksimum Rp 50.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Selain berdasarkan pada peraturan di atas, ukuran perusahaan dapat ditentukan melalui total aset, *log size*, nilai pasar saham, total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata penjualan aset dan lainnya (Novari & Lestari, 2016). Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka perusahaan dianggap semakin mampu untuk mempertahankan usahanya dan menghasilkan laba yang lebih besar pula.

B. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan dijabarkan penelitian terdahulu yang melandasi pembentukan kerangka pemikiran dalam penelitian. Penelitian terdahulu akan terbagi atas penelitian terkait pengungkapan tanggung jawab sosial, faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial, dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Informasi lebih lanjut mengenai penelitian terdahulu dapat dilihat pada bagian Lampiran 4 halaman 153.

1. Penelitian Terkait dengan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

- a. Penelitian oleh Chen (2019) yang berjudul “Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris dan Kepemilikan Asing terhadap Luas Pengungkapan CSR Perusahaan Manufaktur BEI” telah terpublikasikan pada Jurnal Akuntansi El Muhasaba dengan objek penelitian perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016, menggunakan lebih dari 80 data amatan. Variabel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dependen dalam penelitiannya adalah pengungkapan CSR dan variabel independennya meliputi ukuran dewan komisaris dan kepemilikan asing.

Dari hasil penelitian ini, kesimpulannya adalah:

- Ukuran dewan komisaris dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Saran untuk penelitian selanjutnya:

- Menambah variabel penelitian dan sampel penelitian

Penelitian oleh Urmila & Mertha (2017) yang berjudul “Tipe Perusahaan Memoderasi Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Asing pada Pengungkapan CSR Perusahaan Manufaktur BEI” telah terpublikasikan pada E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana dengan objek penelitian perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015, menggunakan 102 perusahaan sebagai sampel penelitian. Variabel dependen dalam penelitiannya adalah pengungkapan CSR, variabel independennya meliputi ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kepemilikan asing serta variabel moderasi adalah tipe perusahaan.

Dari hasil penelitian ini, kesimpulannya adalah:

- Ukuran perusahaan dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
- Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR.
- Tipe perusahaan mampu memperkuat pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR.
- Tipe perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan CSR.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Saran untuk penelitian selanjutnya:

- Menambahkan variabel independen maupun variabel pemoderasi lainnya seperti kepemilikan manajerial, pertumbuhan perusahaan, likuiditas, *leverage*, dan kinerja keuangan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

c. Penelitian oleh Awuy, Sayekti, & Purnamawati (2016) yang berjudul “Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap *Earnings Response Coefficient* (ERC) (Suatu Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2010-2013)” telah terpublikasi pada Jurnal Akuntansi dan Keuangan dengan objek penelitian perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2013, menggunakan 32 perusahaan sebagai sampel penelitian. Variabel dependen penelitiannya adalah *Cumulative Abnormal Return* (CAR), variabel independennya adalah pengungkapan informasi CSR dan *Unexpected Earnings* (UE), serta variabel kontrol yang digunakan adalah *Price to Book Value* (PBV) dan *leverage*.

Dari hasil penelitian ini, kesimpulannya adalah:

- CSR tidak berpengaruh terhadap ERC.

Saran untuk penelitian selanjutnya:

- Menggunakan indeks pengukuran CSR yang mengikuti perkembangan yang ada atau indeks GRI yang lebih mutakhir.
- Menambah variabel kontrol lain seperti BETA, ukuran perusahaan, dan struktur pemodal perusahaan.
- Melakukan perbandingan hasil *checklist* indeks GRI G3 agar hasil lebih objektif.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- d. Penelitian oleh Klerk, Villiers, & Staden (2015) yang berjudul “*The Influence of Corporate Social Responsibility Disclosure on Share Prices Evidence from the United Kingdom*” telah terpublikasi pada *Emerald Insight Pacific Accounting Review* dengan objek penelitian perusahaan UK yang termasuk dalam KPMG *data set* periode 2007-2008, menggunakan 89 perusahaan sebagai sampel penelitian. Variabel dependen dalam penelitiannya adalah *share prices* dan variabel independennya adalah *CSR disclosure*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dari hasil penelitian ini, kesimpulannya adalah:

- *CSR disclosure is positively and significantly associated with share prices in 2007/2008.*
- *CSR disclosure provided by companies operating in environmentally sensitives industries are associated with higher prices than CSR disclosure by companies in other industries.*

- e. Penelitian oleh Oktariani & Mimba (2014) yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Tanggung Jawab Lingkungan pada Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” telah terpublikasikan pada E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana dengan objek penelitian perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012, menggunakan 6 perusahaan sebagai sampel penelitian. Variabel dependen dalam penelitiannya adalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan variabel independennya meliputi hutang, profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan saham asing, komposisi dewan komisaris, dan tanggung jawab lingkungan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dari hasil penelitian ini, kesimpulannya adalah:

- Hutang, profitabilitas, dan tanggung jawab lingkungan berpengaruh signifikan pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
- Ukuran perusahaan, kepemilikan saham asing, dan komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Penelitian Terkait dengan Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

- a. Penelitian oleh Dewi & Sedana (2019) yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*” telah terpublikasi pada E-Jurnal Manajemen dengan objek penelitian perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017, menggunakan 38 perusahaan sebagai sampel. Variabel dependen dalam penelitiannya adalah pengungkapan *corporate social responsibility* dan variabel independennya meliputi profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage*.

Dari hasil penelitian ini, kesimpulannya adalah:

- Profitabilitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
- Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
- *Leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Saran untuk penelitian selanjutnya:

- Menambah variabel independen seperti ukuran dewan komisaris, kinerja lingkungan, kinerja manajerial, dan manajemen laba.

Penelitian oleh Kastamutuwardhani & Khairunnisa (2019) yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan CSR (Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar pada Indeks SRI-Kehati tahun 2013-2017)” telah terpublikasi pada JASa (Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi) dengan objek penelitian perusahaan yang terdaftar pada Indeks SRI-Kehati periode 2013-2017, menggunakan 6 perusahaan sebagai sampel. Variabel dependen dalam penelitiannya adalah pengungkapan CSR dan variabel independennya meliputi profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan.

Dari hasil penelitian ini, kesimpulannya adalah:

- Profitabilitas dan *leverage* memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
- Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Saran untuk penelitian selanjutnya:

- Menambah variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi pengungkapan CSR seperti kepemilikan saham publik, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, profil perusahaan dan likuiditas.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- Menggunakan indeks lain seperti perusahaan yang terdaftar di LQ45, Jakarta Islamic Indeks, Kompas 100 dengan tetap memperhatikan sektor yang berhubungan langsung dengan lingkungan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

c. Penelitian oleh Singal & Putra (2019) yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Asing Pada Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*” telah terpublikasi pada E-Jurnal Akuntansi dengan objek penelitian perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di BEI periode 2013-2017, menggunakan 40 perusahaan sebagai sampel penelitian. Variabel dependen penelitiannya adalah pengungkapan CSR dan variabel independennya adalah kepemilikan saham institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan saham asing.

Dari hasil penelitian ini, kesimpulannya adalah:

- Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR.
- Kepemilikan saham asing berpengaruh negatif tak signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Saran untuk penelitian selanjutnya:

- Mengembangkan indikator untuk menjelaskan luas pengungkapan CSR karena regulasi CSR terus berkembang.
- Memperpanjang periode penelitian sehingga trend pengaruh masing-masing variabel lebih terlihat.

d. Penelitian oleh Silitonga & Simanjuntak (2019) yang berjudul “Pengaruh *Corporate Governance*, *Financial Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Corporate Financial Performance* sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Terdaftar di BEI” telah terpublikasi pada Jurnal Manajemen dengan objek penelitian perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018, menggunakan 83 perusahaan sebagai sampel. Variabel dependen dalam penelitiannya adalah pengungkapan CSR, variabel independennya meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen, *leverage*, dan ukuran perusahaan, serta variabel moderasi yang digunakan adalah *corporate financial performance*.

Dari hasil penelitian ini, kesimpulannya adalah:

- Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.
- *Leverage* dan *corporate financial performance* berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.
- *Corporate financial performance* memperkuat pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR.

e. Penelitian oleh Susanto & Joshua (2018) yang berjudul “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” telah terpublikasi pada Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan dengan objek penelitian perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014, menggunakan 179 perusahaan sebagai sampel penelitian. Variabel dependen penelitiannya adalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan variabel independennya adalah ukuran komisaris, komisaris independen, komite audit, konsentrasi kepemilikan,

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kepemilikan asing, kepemilikan publik, ukuran perusahaan, *leverage*, jenis industri, dan profitabilitas.

Dari hasil penelitian ini, kesimpulannya adalah:

- Komite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan publik, dan jenis industri memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
- Komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
- Ukuran komisaris, kepemilikan asing, *leverage*, umur perusahaan, dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Saran untuk penelitian selanjutnya:

- Menambah periode penelitian agar hasil yang diperoleh menjadi lebih baik.
- Menambah variabel-variabel independen lain seperti likuiditas dan tingkat pertumbuhan perusahaan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- f. Penelitian oleh Susilowati, Candrawati, & Afandi (2018) yang berjudul “Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Ukuran Dewan Direksi terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Indonesia)” telah terpublikasi pada Jurnal Ilmu Manajemen dengan objek penelitian perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2015, menggunakan 17 perusahaan sebagai sampel. Variabel dependen dalam penelitiannya adalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan variabel independennya meliputi ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran dewan komisaris.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dari hasil penelitian ini, kesimpulannya adalah:

- Ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
- Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Saran untuk penelitian selanjutnya:

- Menggunakan sampel yang lebih besar dengan mengambil sampel lebih dari tiga tahun dan dapat meneliti pada sampel seluruh perbankan di Indonesia.
- Menggunakan indikator lain dalam mengukur profitabilitas seperti *Gross Profit Margin* dan *Net Profit Margin*.

Penelitian oleh Ruroh & Latifah (2018) yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan *Risk Minimization* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)” telah terpublikasi pada Jurnal Akademi Akuntansi dengan objek penelitian perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2016, menggunakan 19 perusahaan sebagai sampel. Variabel dependen dalam penelitiannya adalah pengungkapan *corporate social responsibility* dan variabel independennya meliputi profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *risk minimization*.

Dari hasil penelitian ini, kesimpulannya adalah:

- Profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *risk minimization* berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

h. Penelitian oleh Handoyo & Jakasurya (2017) yang berjudul “Analisa Variabel yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” yang telah terpublikasi pada Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis dan Kewirausahaan dengan objek penelitian perusahaan pertambangan yang tercatat



di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2014, menggunakan 68 perusahaan sebagai sampel. Variabel dependen dalam penelitiannya adalah pengungkapan CSR dan variabel independennya meliputi *leverage*, *profitability*, dan *foreign ownership*.

Dari hasil penelitian ini, kesimpulannya adalah:

- *Leverage* dan *profitability* berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.
- *Foreign ownership* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Saran untuk penelitian selanjutnya:

- Menambahkan variabel *size*, *international operation*, dan *economic performance*.

Penelitian oleh Juniarta & Dewi (2017) yang berjudul “Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kinerja Lingkungan, dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Pengungkapan Lingkungan” telah terpublikasi pada Jurnal Akuntansi Trisakti dengan objek penelitian perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016, menggunakan 25 perusahaan sebagai sampel. Variabel dependen dalam penelitiannya adalah pengungkapan lingkungan, variabel independennya meliputi proporsi dewan komisaris independen, kinerja lingkungan, dan pertumbuhan perusahaan, serta variabel moderasi yang digunakan adalah kepemilikan publik.

Dari hasil penelitian ini, kesimpulannya adalah:

- Proporsi dewan komisaris independen dan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan.
- Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan.



- Kepemilikan publik terbukti memperkuat hubungan komisaris independen dengan pengungkapan lingkungan.
- Kepemilikan publik terbukti memperkuat hubungan kinerja lingkungan dengan pengungkapan lingkungan.

Saran untuk penelitian selanjutnya:

- Menambah jumlah sampel penelitian, menggunakan metode penentuan sampel lain sehingga diperoleh jumlah sampel yang lebih banyak.
- Penilaian terhadap pengungkapan lingkungan sebaiknya lebih objektif dengan menggunakan standar baku yang menjelaskan setiap item kategori pengungkapan lingkungan.

Penelitian oleh Siregar & Priantinah (2017) yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Kepemilikan Saham Publik terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*” telah terpublikasi pada Jurnal Profita dengan objek penelitian perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2014, menggunakan 76 perusahaan sebagai sampel. Variabel dependen dalam penelitiannya adalah pengungkapan CSR dan variabel independennya meliputi ukuran komite audit, komposisi dewan komisaris independen, kepemilikan institusi, kepemilikan asing, dan kepemilikan publik.

Dari hasil penelitian ini, kesimpulannya adalah:

- Ukuran komite audit dan kepemilikan asing secara parsial berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.
- Komposisi dewan komisaris independen dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
- Kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Saran untuk penelitian selanjutnya:

- Menggunakan sampel yang lebih luas seperti sektor manufaktur, asuransi, perbankan, dan lain-lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- Menggunakan sampel perusahaan yang lebih banyak dan rentang waktu yang lebih lama agar diperoleh hasil yang lebih akurat.
- Menambah variabel independen yang digunakan seperti komposisi kepemilikan manajerial, kepemilikan keluarga, dan lain-lain.

Penelitian oleh Supriyono, Almasyhari, Suhardjanto, & Rahmawati (2015) yang berjudul “*The Impact of Corporate Governance on Corporate Social Disclosure: Comparative Study in South East Asia*” telah terpublikasi pada *International Journal Monetary Economics and Finance* dengan objek penelitian perusahaan yang terdaftar pada tiga bursa efek yaitu Bursa Efek Indonesia, Kuala Lumpur Stock Exchange, dan Thailand Stock Exchange periode 2009, menggunakan total 181 perusahaan sebagai sampel penelitian. Variabel dependen penelitiannya adalah *corporate social disclosure*, variabel independennya adalah *board of commissioners, main commissioner competence, proportion of independent commissioners, audit committee size, proportion of independent audit committee*, dan *managerial ownership*, serta *size and industry type* sebagai variabel kontrol.

Dari hasil penelitian ini, kesimpulannya adalah:

- *Board of commissioners, proportion of independent commissioners, audit committee size, proportion of independent audit committee, and industry type have a significantly positive effect on CSD.*
- *Managerial ownership, main commissioner competence and size do not affect CSD.*

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Saran untuk penelitian selanjutnya:

- *Future research may use other methods to measure CSD, as well as consider other factors such as political, legal, and cultural ones as study variables.*

Penelitian oleh Nurfadilah & Sagara (2015) yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance*, Karakteristik Perusahaan dan Regulasi Pemerintah Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*” telah terpublikasi pada *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi* dengan objek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2014, menggunakan 120 perusahaan sebagai sampel penelitian. Variabel dependen dalam penelitiannya adalah pengungkapan *corporate social responsibility* dan variabel independennya adalah kepemilikan manajerial, komite audit, ukuran dewan komisaris, profitabilitas, likuiditas, profil perusahaan, dan regulasi pemerintah.

Dari hasil penelitian ini, kesimpulannya adalah:

- Komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
- Kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, profitabilitas, likuiditas, profil perusahaan, dan regulasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

m. Penelitian oleh Pasaribu, Kowanda, & Kurniawan (2015) yang berjudul “Pengaruh *Earning Management* dan Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Emiten Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia” telah terpublikasi pada *JRMB (Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis)* dengan objek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013, menggunakan 120

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan sebagai sampel. Variabel dependen dalam penelitiannya adalah pengungkapan CSR dan variabel independennya meliputi *earning management*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan publik, komite audit, dan ukuran dewan komisaris, dan proporsi dewan komisaris independen.

Dari hasil penelitian ini, kesimpulannya adalah:

- *Earning management*, kepemilikan publik, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
- Kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Saran untuk penelitian selanjutnya:

- Memperluas sampel dengan tidak hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur dan memperbaharui item-item CSR.
- Penggunaan laporan lain seperti laporan pada *website* perusahaan, media cetak dan elektronik di luar laporan tahunan untuk melihat pengungkapan CSR.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dari hasil penelitian ini, kesimpulannya adalah:

- Dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Saran untuk penelitian selanjutnya:

- Memperpanjang periode penelitian agar dapat melihat kecenderungan yang akan terjadi dalam jangka panjang.
- Mempertimbangkan variabel independen lain.

Penelitian oleh Setiawati, Zulfikar & Artha (2013) yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap CSR (Survey pada Industri Perbankan di Indonesia)” telah terpublikasi pada *Proceeding* Seminar Nasional dengan objek penelitian perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010. Variabel dependen penelitiannya adalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan variabel independennya adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan manajerial.

Dari hasil penelitian ini, kesimpulannya adalah:

- Ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
- Profitabilitas, *leverage*, dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Saran untuk penelitian selanjutnya:

- Menggunakan indeks pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan keadaan perusahaan perbankan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Penelitian Terkait dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Kontrol

- a.** Penelitian oleh Ariswari & Damayanthi (2019) yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Kepemilikan Manajemen pada Pengungkapan CSR dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Kontrol” telah terpublikasi pada E-Jurnal Akuntansi dengan objek penelitian perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018, menggunakan 12 perusahaan sebagai sampel. Variabel dependen dalam penelitiannya adalah pengungkapan CSR, variabel independennya meliputi profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan manajemen, serta variabel kontrol adalah ukuran perusahaan.

Dari hasil penelitian ini, kesimpulannya adalah:

- Profitabilitas, kepemilikan manajemen, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR.
- *Leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

- b.** Penelitian oleh Shoimah & Aryani (2019) yang berjudul “*Slack Resources, Family Ownership, dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility*” telah terpublikasi pada Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan (jrak) dengan objek penelitian perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2017, menggunakan 139 perusahaan sebagai sampel. Variabel dependen dalam penelitiannya adalah pengungkapan CSR, variabel independennya meliputi *slack resources* dan *family ownership*, serta variabel kontrol dalam penelitiannya adalah *age, size, dan leverage*.

Dari hasil penelitian ini, kesimpulannya adalah:

- *Slack resources* dan *size* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- *Family ownership* berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan CSR.
- *Age* dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

c. Penelitian oleh Yuliani (2019) yang berjudul “Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* pada Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Tergabung dalam Indeks Kompas 100” telah terpublikasi pada AT-Tadbir Jurnal Ilmiah Manajemen dengan objek penelitian emiten Bursa Efek Indonesia yang dikategorikan dalam indeks Kompas 100 periode 2014, menggunakan 100 perusahaan sebagai sampel. Variabel dependen dalam penelitiannya adalah CSRD, variabel independennya adalah dewan komisaris independen, komite audit independen, dan struktur kepemilikan saham publik, serta variabel kontrol yang digunakan adalah *size*, *leverage*, dan profitabilitas.

Dari hasil penelitian ini, kesimpulannya adalah:

- Dewan komisaris independen dan *size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap CSRD.
- Komite audit independen, struktur kepemilikan saham publik, *leverage*, dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap CSRD.

Saran untuk penelitian selanjutnya:

- Penggunaan jumlah pengamatan yang lebih luas, tidak hanya satu tahun agar menghasilkan data yang lebih komprehensif mengingat penerapan mekanisme GCG maupun CSR sudah lama diterapkan di Indonesia.
- Menambah variabel independen yang dinilai mampu mempengaruhi pengungkapan CSR.

d. Penelitian oleh Tanihatu (2016) yang berjudul “Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) (Studi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)” telah terpublikasi pada Jurnal Maneksi dengan objek penelitian perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2013. Variabel dependen dalam penelitiannya adalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, variabel independennya meliputi kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen, serta variabel kontrol dalam penelitian adalah ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas.

Dari hasil penelitian ini, kesimpulannya adalah:

- Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, *leverage*, dan profitabilitas tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.
- Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Saran untuk penelitian selanjutnya:

- Menggunakan tahun amatan yang lebih lama agar dapat diperoleh hasil yang lebih detil mengenai perusahaan sehingga dapat diketahui apakah pengungkapan tanggung jawab sosial sudah dilakukan secara berkesinambungan atau tidak.

e. Penelitian oleh Habbash (2015) yang berjudul “*Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence from Saudi Arabia*” telah terpublikasi pada *Economic and Social Development* dengan objek penelitian perusahaan keuangan dan asuransi yang terdaftar di *Saudi Stock Exchange* periode 2007-2011, menggunakan 172 perusahaan sebagai sampel. Variabel dependen dalam penelitiannya adalah *CSR disclosure*, variabel independennya meliputi *audit committee*, *board independence*, *role duality*, *government*

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ownership, institutional ownership, dan family ownership, serta variabel kontrol dalam penelitiannya adalah leverage, firm size, ROA, firm age, dan industry type.

Dari hasil penelitian ini, kesimpulannya adalah:

- *Audit committee, board independence, role duality, institutional ownership, ROA, and industrial type statistically insignificant and may not affect CSR disclosure.*
- *Government ownership, family ownership, firm size, and firm age are positive and statistically significant affect CSR disclosure.*
- *Leverage is negative and statistically significant affect CSR disclosure.*

Saran untuk penelitian selanjutnya:

- *Future research could overcome these research limitations by enlarging the sample size and undertaking a comparative study between the periods before and after the application of the Saudi CG code in 2007.*
- *Used computerized content analysis which is more accurate and valid.*
- *Future studies could fill voluntary disclosure literature gap by examining the economic consequences of CSR disclosure, the influence of CSR disclosure on the cost of capital, analyst following, or firm value.*
- *Cross-country study would be beneficial to understand the influence of differences in regulations and cultures on CSR disclosure.*

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Perusahaan sebagai sebuah organisasi yang berorientasi pada laba senantiasa perlu memperhatikan tingkat laba yang dihasilkannya. Informasi laba yang



disediakan perusahaan menjadi indikator pertanggung jawaban manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan sekaligus membantu pemegang saham dalam memperkirakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendapatan di masa mendatang (Hasty & Herawaty, 2017). Salah satu informasi terkait laba yang sering digunakan oleh berbagai pihak adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan alat ukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam kaitannya dengan penjualan, total aktiva dan modal (ekuitas) (Sari & Asiah, 2016). Menurut Nurmawardi & Lubis (2019) profitabilitas menjadi tolak ukur utama bagi perusahaan mengenai performanya selama periode tertentu dan menjadi salah satu aspek pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan mengindikasikan semakin tinggi laba yang dihasilkan. Ketika perusahaan memperoleh laba yang tinggi maka dorongan bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial juga semakin besar. Hal ini disebabkan dengan semakin meningkatnya laba perusahaan, kemampuan perusahaan dalam membiayai pengungkapan tanggung jawab sosial juga akan semakin tinggi (Kamil & Herusetya, 2012; Suaryana & Dewi, 2015). Melalui pengungkapan yang semakin tinggi perusahaan ingin menunjukkan bukti kepada para pemangku kepentingan bahwa terdapat kontribusi laba perusahaan yang dialokasikan untuk memulihkan kondisi lingkungan dan masyarakat yang berdampingan dengan aktivitas perusahaan (Krisna & Suhardianto, 2016).

Di sisi lain, perusahaan yang memiliki kelebihan dana akan mendapatkan sorotan dari masyarakat (Rahayu & Anisyukurillah, 2015). Oleh karena itu, perusahaan akan mengungkapkan informasi tanggung jawab sosialnya secara lebih luas guna memperoleh legitimasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap segala aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Apabila kepercayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penyedia sudah diberikan masyarakat kepada perusahaan, maka perusahaan akan memperoleh berbagai keuntungan dari situasi tersebut seperti meningkatnya loyalitas konsumen dan citra perusahaan di mata publik (Permadiswara & Sujana, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Sha (2014) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil Penelitian tersebut didukung oleh hasil penelitian Pradnyani & Sisdyani (2015); Anfriyani & Mudjiyanti (2017) yang menunjukkan hasil serupa. Maka berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang dibangun, peneliti membuat hipotesis bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2. Pengaruh *Leverage* Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Pendanaan untuk kegiatan operasional perusahaan tidak hanya mengandalkan modal pemilik dan investasi yang diberikan para investor, tetapi juga dapat diperoleh melalui pinjaman kepada kreditor. Banyaknya pinjaman yang digunakan perusahaan untuk mendanai kegiatan operasionalnya disebut dengan *leverage* (Dharma & Ardiana, 2016). Definisi yang berbeda diperlihatkan oleh Adisamartha & Noviari (2015) yang menyatakan bahwa hasil perhitungan *leverage* sebenarnya mencerminkan seberapa besar aset perusahaan yang berasal dari pinjaman.

Pada saat perusahaan memutuskan untuk melakukan pinjaman kepada kreditor, saat itu juga perusahaan terikat pada kontrak utang. Kontrak utang merupakan bentuk perjanjian yang bertujuan untuk melindungi kreditor dari tindakan manajemen perusahaan yang dapat mengancam kepentingan kreditor (Saputra,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2016). Pada perjanjian tersebut telah ditetapkan tingkat minimum ekuitas perusahaan yang harus dipertahankan. Dengan semakin tingginya *leverage* perusahaan, maka kewajiban perusahaan dalam memenuhi kontrak utang juga semakin besar. Kondisi tersebut mengakibatkan manajemen harus membuat kebijakan guna mencegah terjadinya pelanggaran kontrak hutang, yaitu dengan mempertahankan tingkat ekuitas perusahaan. Agar ekuitas terjaga, manajemen akan meningkatkan laba yang dilaporkan dengan meminimalisir biaya yang dikeluarkan dalam operasional perusahaan termasuk di dalamnya biaya pengungkapan tanggung jawab sosial (Belkaoui & Karpik, 1989; Putri & Christiawan, 2014). Peningkatan laba ini bertujuan untuk menaikkan nilai *retained earning* perusahaan sehingga nilai ekuitas tetap berada pada ambang batas aman.

Dari penjabaran tersebut terlihat bahwa *leverage* yang semakin tinggi menyebabkan pengungkapan tanggung jawab sosial semakin rendah atau dapat dikatakan *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pernyataan tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunaryo & Mahfud (2016); Dewi & Sedana (2019) yang menemukan bukti bahwa *leverage* berpengaruh secara negatif terhadap pengungkapan CSR. Maka berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang dibangun, peneliti membuat hipotesis bahwa *leverage* berpengaruh secara negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Saham merupakan bentuk kepemilikan perusahaan bagi para pemegangnya. Bagi perusahaan yang sudah *go public*, kepemilikan saham dapat diperoleh berbagai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pihak mulai dari masyarakat umum, institusi lain, pemerintah, dan bahkan manajemen perusahaan itu sendiri. Situasi di mana manajemen sekaligus bertindak sebagai pemegang saham disebut sebagai kepemilikan manajerial. Suastini, Purbawangsa, & Rahyuda (2016) mendefinisikan kepemilikan manajerial sebagai kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang meliputi manajer, direktur, atau komisaris di mana pihak-pihak tersebut terlibat langsung dalam pengambilan keputusan.

Teori agensi yang diungkapkan oleh Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa ketika seorang manajer memiliki 100% saham atas sebuah perusahaan atau dengan kata manajer berada di posisi sebagai pengelola (agen) sekaligus pemilik (prinsipal), maka manajer akan cenderung membuat keputusan yang diambil dari dua sudut pandang yang berbeda. Pada kondisi tersebut, terlihat bahwa kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan tujuan agen dan prinsipal sehingga konflik keagenan dapat berkurang. Semakin tinggi kepemilikan oleh manajemen perusahaan, maka semakin tinggi juga upaya manajer dalam memenuhi kepentingannya sebagai pemegang saham guna mengurangi risiko kehilangan kekayaannya yang terikat dengan kekayaan perusahaan (Sumilat & Destriana, 2017). Selain itu manajer juga akan termotivasi untuk melakukan usaha lebih dalam menciptakan keuntungan bagi perusahaan yang nantinya akan berdampak kepada keuntungan pribadi manajer (Aniktia & Khafid, 2015). Salah satu bentuk kepentingan pemegang saham adalah memperoleh informasi mengenai kegiatan perusahaan secara maksimal. Seiring dengan meningkatnya kepemilikan manajerial, maka akan timbul dorongan bagi pihak manajemen untuk mengungkapkan informasi secara lebih luas termasuk informasi terkait tanggung jawab sosial perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.



Prakasa (2017); Ariswari & Damayanthi (2019) melalui penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Maka berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang dibangun, peneliti membuat hipotesis bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

4. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Komisaris independen sebagai bagian dari dewan komisaris merupakan salah satu mekanisme tata kelola yang memiliki peranan penting bagi perusahaan. Diantari & Ulupui (2016) mendefinisikan komisaris independen sebagai pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan pemegang saham, anggota direksi, maupun anggota komisaris lainnya.

Salah satu fungsi utama dari keberadaan komisaris independen adalah fungsi pengawasan. Komisaris independen dianggap dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen sehingga seluruh aktivitas dan kinerja manajemen akan dilakukan dengan lebih hati-hati. Hal tersebut secara langsung akan mengurangi perilaku oportunistik manajemen dan mampu meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan (Forker, 1992). Chen & Jaggi (2000) secara lebih lanjut menjelaskan bahwa komisaris independen cenderung lebih responsif terhadap kepentingan investor, sehingga komisaris independen akan mendorong perusahaan untuk lebih 'patuh' dalam hal pengungkapan informasi yang nantinya berdampak pada kualitas pengungkapan itu sendiri.



Sudut pandang berbeda dikemukakan oleh Haniffa & Cooke (2005) yang menjelaskan bahwa komisaris independen berfokus pada penghargaan dan kewajiban perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosialnya, di mana pelaksanaan kegiatan tersebut dipandang akan menaikkan citra perusahaan. Pada akhirnya pandangan tersebut akan membuat komisaris independen mendesak perusahaan untuk mengungkapkan informasi tanggung jawab sosialnya guna memastikan terjadinya keselarasan antara tindakan perusahaan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dewan komisaris yang didominasi oleh komisaris independen akan lebih mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Naseem, Riaz, Rehman, Ikram, & Malik (2017); Juniarta & Dewi (2017) menemukan bahwa semakin besar ukuran komisaris independen semakin luas pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini selaras dengan Haniffa & Cooke (2005) yang menyatakan semakin dominan keberadaan komisaris independen maka perusahaan semakin terdorong untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Maka berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang dibangun, peneliti membuat hipotesis bahwa komisaris independen berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

5. Pengaruh Komite Audit Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh komite audit. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 pasal 1 ayat (7) komite audit didefinisikan sebagai komite yang dibentuk dan bertanggung jawab

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terhadap dewan komisaris dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi dewan komisaris. Secara umum komite audit berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Bentuk pengawasan yang dilakukan komite audit dapat berupa peningkatan kualitas laporan keuangan, peningkatan keefektifan audit perusahaan, dan pengendalian internal perusahaan (Utari, 2014).

Keberadaan komite audit sebagai salah satu pengawas perusahaan dapat meningkatkan efektivitas dari tata kelola perusahaan. Salah satu prinsip tata kelola perusahaan yang menjadi fokus komite audit adalah transparansi perusahaan (Aniktia & Khafid, 2015). Perusahaan memiliki kewajiban untuk mengungkapkan berbagai aktivitas bisnisnya dalam pelaporan keuangan, salah satunya terkait dengan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan. Kurniawati & Yaya (2017) mengungkapkan bahwa komite audit sebagai alat kelengkapan perusahaan akan memastikan pengendalian internal berjalan dengan baik. Ketika sebuah perusahaan memiliki kualitas pengendalian internal yang baik maka secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas pengungkapan informasinya.

Penelitian Rizki, Basri, & Musnadi (2014); Laksmi & Kamila (2018) menemukan cukup bukti adanya pengaruh positif komite audit terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Kedua penelitian tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Kurniawati & Yaya (2017). Maka berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang dibangun, peneliti membuat hipotesis bahwa komite audit berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

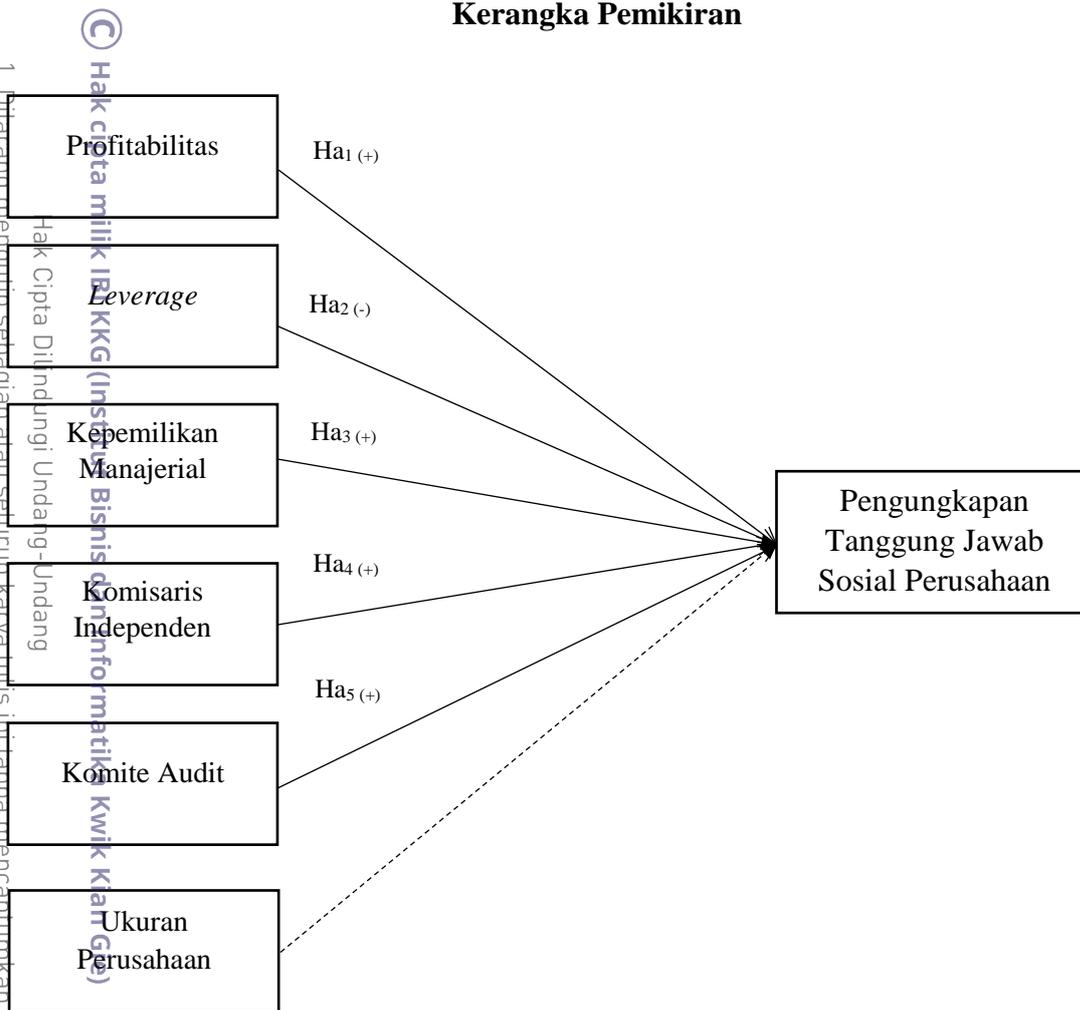
Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2. 2
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah dijabarkan sebelumnya maka peneliti menyimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ha₁: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Ha₂: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Ha₃: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.



Ha4: Komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Has: Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.